

# Implementation Of E-Buddy In The Administrative Process In Permisan Village, Jabon

## [Implementasi E-Buddy pada Proses Ketatausahaan di Desa Permisan, Jabon]

Annisa Cahyaning Nugraeni <sup>1)</sup>, Lailul Mursyidah <sup>\*2)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: [lailulmursyidah@umsida.ac.id](mailto:lailulmursyidah@umsida.ac.id)

**Abstract.** *The purpose of this study is to describe and analyze how the implementation of the E-Buddy application in the administrative process in the Permisan Village Government, Jabon. E-Buddy is a digital innovation for managing correspondence as part of E-Government. The research method uses a qualitative descriptive approach with interviews, observations, and documentation. Informants were selected using purposive sampling techniques, including: Village Head, Village Secretary, and Head of Administration. With Miles Huberman's data analysis technique, namely; data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study show that from the four indicators it was found that: 1) The Communication Indicator is very good although there are still inconsistencies in conveying information using two different applications. 2) The Resource Indicator, both human resources and infrastructure resources, strongly supports the implementation of E-Buddy very well. 3) The Disposition Indicator has not been implemented well because the leadership's attitude has not fully supported the implementation of E-Buddy. and 4) The Bureaucratic Structure Indicator, both organizational structure / SOP applied is appropriate. The analysis is based on George C. Edward III's policy implementation theory, which encompasses communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The novelty of this study lies in its focus on the implementation of the E-Buddy application in Permisan Village, which has never been studied before, as well as the in-depth use of George C. Edward III's policy implementation theory and the presentation of periodic data.*

**Keywords -** Administration; Edward III; E-Buddy; E-Government; Implementation

**Abstrak.** *Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi aplikasi E-Buddy dalam proses ketatausahaan di Pemerintah Desa Permisan, Jabon. E-Buddy merupakan inovasi digital untuk pengelolaan surat menyurat sebagai bagian dari E-Government. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih dengan teknik purposive sampling diantaranya : Kepala Desa, Sekertaris Desa, dan Kaur Tata Usaha. Dengan Teknik analisis data Miles Huberman yakni ; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari keempat indikator ditemukan bahwa : 1) Indikator Komunikasi sudah sangat baik meskipun masih terdapat inkonsistensi penyampaian informasi menggunakan dua aplikasi yang berbeda. 2) Indikator Sumber Daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya sarana prasarana sangat mendukung pengimplementasian E-Buddy dengan sangat baik. 3) Indikator Disposisi masih belum terlaksana dengan baik karena sikap pimpinan belum sepenuhnya mendukung implementasi E-Buddy. dan 4) Indikator Struktur birokrasi baik susunan organisasi / SOP yang diterapkan sudah sesuai. Analisis didasarkan pada teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap implementasi aplikasi E-Buddy di Desa Permisan yang belum pernah diteliti sebelumnya, serta penggunaan teori implementasi kebijakan George C. Edward III secara mendalam dan penyajian data berkala.*

**Kata Kunci -** Administrasi; Edward III; E-Buddy; E-Government; Implementasi

## I. PENDAHULUAN

Secara asal katanya, istilah administrasi berasal dari bahasa Inggris “administration”, dengan bentuk dasarnya “to administer” yang berarti mengelola. Selain itu, kata ini juga berasal dari bahasa Belanda “administratie”, yang maknanya mencakup kegiatan tata usaha, pengelolaan organisasi, serta manajemen sumber daya [1]. Menurut Sondang P. Siagian, administrasi adalah seluruh proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara rasional dengan tujuan untuk mencapai sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya [2]. Maka kegiatan administrasi adalah kegiatan pengelolaan data-data maupun surat menyurat.

Administrasi merupakan elemen penting yang tak terpisahkan dari aktivitas lembaga, baik di sektor pemerintah maupun swasta. Sebagai bagian dari manajemen tata usaha, administrasi memegang peran vital dalam mendukung

kelancaran operasional organisasi. Salah satu aspek penting dalam tata usaha adalah pengelolaan surat menyurat, yang menjadi sarana komunikasi tertulis antara pihak pengirim dan penerima untuk berbagai tujuan tertentu [3]. Di antaranya, surat dinas berfungsi sebagai media penyampaian informasi resmi yang mencakup naskah kedinasan, pemberitahuan, pernyataan, permintaan, serta berbagai keperluan kedinasan lainnya [4].

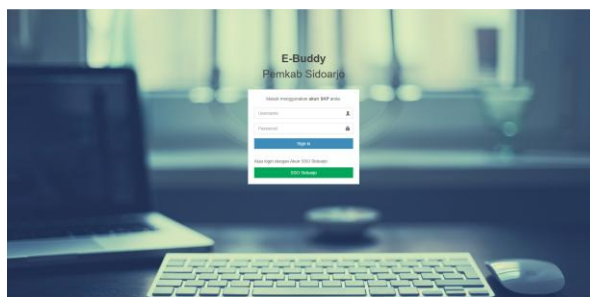
Pengelolaan arsip secara manual sering kali memakan ruang penyimpanan yang besar dan mengurangi efisiensi waktu. Selain itu, jika pimpinan sedang berada di luar kantor sementara surat masih dalam proses administrasi, menyebabkan penundaan dalam pengiriman surat kepada pihak terkait. Dalam hal distribusi surat, aparatur desa harus mengirimkan dokumen secara langsung ke dinas atau badan pemerintah terkait, yang membutuhkan waktu dan tenaga tambahan. Oleh karena itu, penggunaan teknologi dalam kegiatan ketatausahaan akan lebih efektif dan efisien [5].

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), atau *Information and Communication Technology (ICT)* saat ini sudah diterapkan dalam sistem pemerintahan. Ini terlihat dari adanya keterlibatan Masyarakat dalam Media Sosial yang menjadi indikator bahwa interaksi antara warga dengan pemerintah sudah berkembang seiring dengan perkembangan teknologi yang ada. Ada 3 tipe keterlibatan Masyarakat dalam pemerintahan. Yang pertama, *Citizen Sourcing*, Masyarakat memberikan masukan kepada pemerintah. *Government as platform*, pemerintahan menyediakan system berbasis teknologi seperti aplikasi atau Aplikasi yang bisa digunakan Masyarakat untuk mengakses layanan. Dan *Do It Yourself Government*, Masyarakat menyelesaikan persoalannya sendiri, dan pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator [6].

E-Government adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan tata kelola pemerintahan. Penggunaan E-Government membuka peluang untuk meningkatkan hubungan antar instansi pemerintah, serta antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat. Hubungan ini terjalin melalui pemanfaatan teknologi informasi, yang mengintegrasikan fungsi komputer dengan sistem jaringan komunikasi [7].

Teknologi digital, E-government telah diterapkan dalam administrasi pemerintahan baik pusat maupun daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan [8]. Kabupaten Sidoarjo telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai upaya mendukung terwujudnya Smart City. Menurut The World Bank Group, E-Government ialah upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik [9].

E-Buddy dirancang sebagai tindak lanjut dari penerapan E-Governance G2E (Government to Employee). Aplikasi ini merupakan salah satu inovasi di Kabupaten Sidoarjo yang berfungsi sebagai platform pengelolaan surat menyurat berbasis digital. Fitur utamanya yakni menu surat masuk, surat keluar, dan presensi. Dengan E-Buddy, kebutuhan administrasi dapat dikelola secara lebih efektif dan efisien. Pembuatan aplikasi ini memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik [4]. Selain itu, E-Buddy telah memenuhi standar operasional prosedur sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 yang membahas mengenai surat-menyurat di Kabupaten Sidoarjo [10]. Berikut adalah tampilan pada Aplikasi E-Buddy.



**Gambar 1.** Login Page aplikasi E-Buddy  
Sumber : Aplikasi E-Buddy, 2025

Aplikasi E-Buddy Sidoarjo merupakan sistem digital yang dikembangkan dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai bagian dari implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pengelolaan aplikasi ini berada di bawah koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo, khususnya dalam mendukung manajemen surat-menyurat elektronik (e-office).

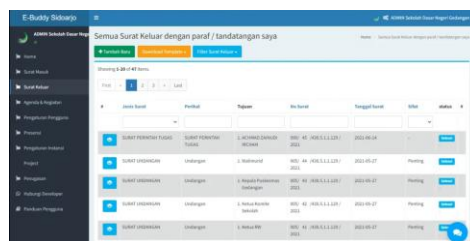
E-Buddy diterapkan di seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kecamatan, hingga desa dan kelurahan. Dengan demikian, aplikasi ini menjadi platform terpadu yang digunakan oleh seluruh lembaga pemerintah daerah dalam menunjang administrasi dan tata kelola pemerintahan secara digital. Desa Permisian, Kecamatan Jabon, merupakan salah satu wilayah yang mulai mengadopsi teknologi digital melalui aplikasi E-Buddy. Sejak 2020, aplikasi E-Buddy telah digunakan sebagai digitalisasi surat kedinasan di Pemerintah desa Permisian.

Di dalam aplikasi E-Buddy tersedia berbagai fitur pendukung, antara lain menu surat masuk dan surat keluar, pengaturan pengguna, presensi, manajemen kinerja, pengaturan instansi, serta panduan penggunaan dan layanan pengaduan apabila terjadi kendala teknis. Adapun tampilan awal aplikasi saat pengguna melakukan login menampilkan menu utama yang menjadi akses ke seluruh fitur tersebut. Aplikasi ini dirancang untuk mendukung pengelolaan administrasi desa secara lebih efisien, seperti pengarsipan dokumen, pelayanan administrasi surat menyurat, hingga presensi kehadiran secara online bagi ASN dan Non ASN di lingkungan pemerintah kabupaten sidoarjo. Berikut adalah tampilan dashboard E-Buddy :



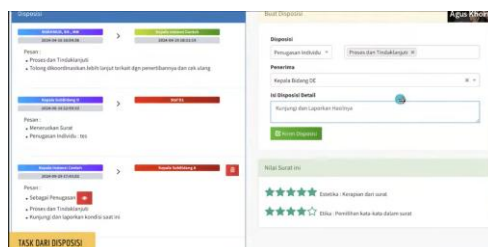
**Gambar 2. Dashboard E-Buddy**  
Sumber : Aplikasi E-Buddy

Untuk mengakses aplikasi E-Buddy, pengguna terlebih dahulu melakukan login melalui laman resmi <https://E-Buddy.sidoarjojab.go.id/site/login> dengan menggunakan username dan password yang sama seperti akun SKP (Sasaran Kinerja Pegawai). Pada Gambar 2 ditampilkan dashboard utama aplikasi E-Buddy setelah proses login berhasil dilakukan. Melalui halaman tersebut, pengguna dapat mengakses berbagai menu utama, seperti Surat Masuk, Surat Keluar, dan Absensi. Proses penerimaan surat dilakukan melalui menu Surat Masuk. Pada menu ini, sistem secara otomatis menampilkan daftar surat yang diterima oleh pengguna, lengkap dengan informasi terkait status disposisi masing-masing surat. Fitur ini memudahkan pengguna dalam memantau tindak lanjut surat secara digital.



**Gambar 3. Tampilan Surat Masuk**  
Sumber : Aplikasi E-Buddy

Gambar di atas menampilkan halaman menu Surat Masuk pada aplikasi E-Buddy. Pada menu tersebut terdapat daftar surat yang dikirimkan oleh instansi lain melalui sistem E-Buddy. Setiap surat yang masuk dilengkapi dengan informasi penting, seperti nomor surat, tanggal surat, jenis surat, serta isi atau pesan yang disampaikan. Surat-surat tersebut dapat diakses oleh Pegawai Pemerintah Desa Permisan melalui akun E-Buddy masing-masing. Dengan demikian, setiap pegawai yang memiliki kewenangan dapat mengetahui informasi surat secara cepat dan transparan tanpa harus menunggu distribusi dokumen fisik.



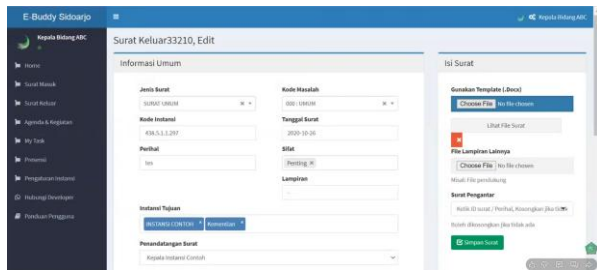
**Gambar 4. Tampilan Disposisi Surat**  
Sumber : Aplikasi E-Buddy

Apabila terdapat surat yang memerlukan tindak lanjut atau pendisposisian, surat tersebut dapat diteruskan kepada pihak yang berwenang, misalnya kepada Kepala Desa. Proses pendisposisian ini dilakukan secara digital melalui fitur Disposisi Surat yang tersedia dalam aplikasi E-Buddy. Melalui fitur tersebut, pengguna dapat memberikan arahan,

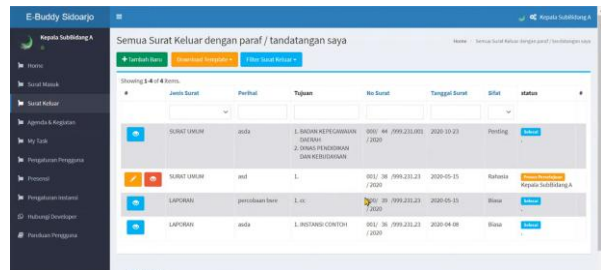
instruksi, atau catatan tertentu kepada pegawai yang dituju sebagai bentuk tindak lanjut atas surat yang diterima. Fitur ini menunjukkan bahwa aplikasi E-Buddy tidak hanya berfungsi sebagai media penyimpanan surat elektronik, tetapi juga sebagai sarana pengendalian dan pengelolaan alur kerja administrasi secara terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Adapun tampilan fitur Disposisi Surat dapat dilihat pada gambar berikut.

Disposisi merupakan proses pemberian arahan atau instruksi pimpinan terhadap suatu surat yang diterima untuk ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. Dalam konteks administrasi pemerintahan, disposisi berfungsi sebagai mekanisme pengendalian alur surat agar setiap dokumen yang masuk dapat diproses sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pegawai. Selain itu, disposisi juga menjadi bentuk delegasi kewenangan yang tercatat secara administratif sehingga setiap tindak lanjut memiliki dasar yang jelas. Dengan adanya proses disposisi yang terdokumentasi, akuntabilitas dan ketertelusuran penanganan surat dapat terjaga secara sistematis.

Pada aplikasi E-Buddy, proses disposisi dilakukan secara digital sehingga lebih efisien, terdokumentasi, dan mudah dipantau. Berikut langkah-langkah detail pendisposisian surat pada E-Buddy: Dalam aplikasi E-Buddy, proses disposisi dilakukan secara digital melalui beberapa tahapan, yaitu dengan membuka menu *Surat Masuk* untuk melihat daftar surat yang diterima, kemudian memilih surat yang akan didisposisikan dan membuka detailnya. Selanjutnya, pengguna mengisi kolom disposisi dengan mencantumkan arahan atau catatan pimpinan serta menentukan kepada siapa surat tersebut diteruskan, baik kepada bawahan maupun bagian terkait. Setelah itu, pengguna menekan tombol kirim atau simpan (*create/submit*) agar disposisi tercatat dalam sistem dan surat terdistribusi secara otomatis. Tahap terakhir adalah melakukan verifikasi untuk memastikan surat telah masuk ke folder disposisi pihak yang dituju sehingga dapat segera ditindaklanjuti.



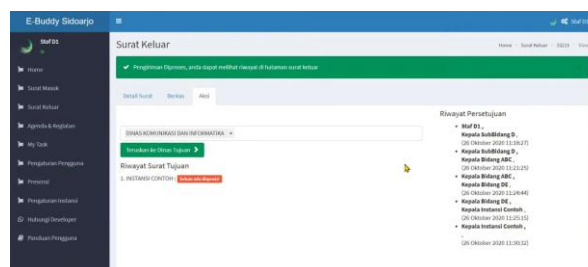
**Gambar 5.** Pembuatan Surat Keluar di E-Buddy  
Sumber : Aplikasi E-Buddy



**Gambar 6.** Riwayat Surat Keluar E-Buddy  
Sumber : Aplikasi E-Buddy

Penyusunan dokumen surat keluar dilakukan melalui fitur Surat Keluar sebagaimana ditampilkan pada Gambar 5 (Pembuatan Surat Keluar). Pada menu tersebut, pengguna dapat membuat surat baru dengan mengisi berbagai informasi pendukung, seperti nomor surat, perihal, tanggal surat, serta nama pejabat yang akan menandatangani dokumen. Selain itu, pengguna juga dapat melampirkan dokumen pendukung sesuai kebutuhan. Seluruh data yang diinput akan tersimpan dalam sistem sehingga meminimalisir kesalahan pencatatan serta memudahkan proses pelacakan dokumen di kemudian hari. Proses ini menunjukkan bahwa sistem telah dirancang untuk mendukung tata kelola administrasi yang lebih terstruktur dan terdokumentasi secara digital.

Setelah surat selesai disusun dan diunggah ke dalam sistem, dokumen tersebut akan tersimpan secara otomatis sebagai arsip digital. Riwayat surat yang telah dibuat dapat ditinjau kembali melalui menu Surat Keluar, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 6 (Riwayat Surat Keluar). Pada halaman ini, pengguna dapat melihat daftar surat yang telah dibuat atau dikirim sebelumnya lengkap dengan informasi statusnya. Fitur ini mendukung tertib administrasi, meningkatkan efisiensi kerja, serta memperkuat sistem dokumentasi berbasis elektronik dalam rangka mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan demikian, setiap surat yang diterbitkan memiliki jejak digital yang jelas sehingga mempermudah proses evaluasi dan pengawasan administrasi.



**Gambar 7.** Tampilan Riwayat Surat Tujuan dan Riwayat Persetujuan Pejabat Terkait  
Sumber : Aplikasi E-Buddy

Setelah surat selesai disusun dan disimpan dalam bentuk draft, sistem akan menampilkan riwayat surat beserta tahapan proses persetujuan oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana terlihat pada Gambar 4. Melalui fitur ini, pimpinan dapat melakukan peninjauan terhadap isi surat sebelum diterbitkan. Pimpinan memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan, membubuhkan tanda tangan elektronik, maupun menyampaikan catatan perbaikan apabila terdapat bagian yang perlu direvisi. Apabila surat telah memperoleh persetujuan, dokumen tersebut dapat dikirimkan kepada instansi tujuan melalui sistem. Selanjutnya, surat keluar akan tersimpan secara otomatis dalam arsip digital aplikasi, sehingga dapat diunduh kembali atau diteruskan ke pihak yang dituju sesuai kebutuhan. Fitur ini memastikan proses administrasi berjalan secara tertib, terdokumentasi, dan sesuai dengan mekanisme persetujuan yang berlaku.



**Gambar 8.** Menu presensi E-Buddy  
Sumber : Aplikasi E-Buddy



**Gambar 9.** Rekap presensi E-Buddy  
Sumber : Aplikasi E-Buddy

Selain menyediakan fitur pengelolaan surat menyurat, aplikasi E-Buddy juga dilengkapi dengan sistem presensi pegawai berbasis daring yang terintegrasi dalam satu platform. Menu presensi dapat dilihat pada Gambar 8 (Menu Presensi). Melalui fitur ini, seluruh pegawai dapat melakukan pencatatan kehadiran harian dengan mengunggah foto diri serta mencatat lokasi kehadiran yang terhubung langsung dengan sistem GPS. Sistem secara otomatis merekam waktu kedatangan dan kepulangan pegawai, kemudian menyimpan data tersebut ke dalam basis data secara real time.

Data kehadiran yang telah tercatat selanjutnya dapat dilihat pada Gambar 9 (Menu Rekapitulasi Presensi), yang menampilkan rangkuman kehadiran pegawai dalam periode tertentu. Menu ini memudahkan pimpinan dalam melakukan monitoring, evaluasi, serta pengendalian kedisiplinan pegawai. Dengan adanya fitur presensi dan rekapitulasi ini, E-Buddy tidak hanya berfungsi sebagai sistem administrasi surat menyurat, tetapi juga sebagai instrumen pendukung manajemen kepegawaian yang lebih efisien, transparan, dan terdokumentasi secara digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai TU di desa Permisan yang mengungkapkan bahwa E-Buddy sangat memberikan kemudahan dalam proses ketatausahaan seperti surat menyurat. Karna dengan sistem tersebut, pengarsipan dokumen bisa lebih rapi dan memudahkan pencarian dokumen apabila sewaktu-waktu diperlukan. Dengan demikian, implementasi E-Buddy di Desa Permisan menjadi langkah awal dalam mewujudkan desa digital yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini didukung dengan data rekapitulasi surat menyurat di Pemerintah Desa Permisan yang diperoleh sebagai berikut.

**Tabel 1.** Rekapitulasi Surat-Menyurat dalam E-Budy Pemerintah Desa Permisan

No	Tahun	Surat Masuk	Surat Keluar	Disposisi Surat
1	2020	22	-	22
2	2021	251	65	251
3	2022	301	282	301
4	2023	339	324	339
5	2024	352	225	352
6	2025	98	62	98

Sumber : Pemerintah Desa Permisan (2025)

Berdasarkan data pengelolaan surat melalui akun E-Buddy di Pemerintah Desa Permisian dari tahun 2020 hingga April 2025, terlihat adanya peningkatan signifikan dalam aktivitas administrasi desa terutama keperluan surat-menyurat pada aplikasi E-Buddy. Pada tahun 2020, penggunaan E-Buddy tampak masih terbatas dengan hanya 22 surat masuk dan belum tercatatnya surat keluar, namun mulai tahun 2021 hingga 2024 terjadi lonjakan pada jumlah surat masuk, surat keluar, dan disposisi surat, yang menunjukkan bahwa sistem mulai diimplementasikan secara aktif dan konsisten. Hingga April 2025, tercatat 98 surat masuk dan 62 surat keluar, Keseluruhan data ini mengindikasikan bahwa implementasi E-Buddy telah mendorong efisiensi dan keteraturan dalam proses ketatausahaan desa.

Berdasarkan observasi di lapangan terkait “implementasi e-buddy pada proses ketatausahaan di desa permisan, jabon” dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi E-Buddy di Desa Permisian. Permasalahan utama yang ditemukan terletak pada aspek disposisi surat. Proses disposisi surat masuk hingga saat ini masih dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu secara manual dan melalui sistem digital E-Buddy. Dualisme mekanisme ini menunjukkan bahwa proses digitalisasi belum sepenuhnya berjalan secara konsisten. Sikap pelaksana dinilai kurang mendukung implementasi E-Buddy.

Kondisi tersebut terjadi karena Kepala Desa sebagai aktor kunci dalam proses disposisi belum secara aktif dan konsisten menggunakan aplikasi E-Buddy. Akibatnya, operator E-Buddy (Kaur Tata Usaha) tetap harus mencetak surat masuk dan menyerahkannya secara langsung kepada Kepala Desa untuk memperoleh disposisi manual. Setelah disposisi diberikan secara tertulis, operator kemudian tetap menginput disposisi tersebut ke dalam sistem sebagai bentuk pencatatan dan arsip elektronik. Hal ini menyebabkan terjadinya duplikasi pekerjaan serta mengurangi efisiensi yang seharusnya dihasilkan oleh sistem digital.

Apabila dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III, khususnya pada indikator disposisi (disposition), kondisi ini mencerminkan belum optimalnya sikap dan komitmen pelaksana kebijakan dalam mendukung implementasi program. Menurut Edward III, disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, dan tingkat penerimaan pelaksana terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pelaksana memiliki kemauan dan dukungan terhadap kebijakan tersebut.

Berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan implementasi E-Buddy sebagai berikut : Yang pertama, penelitian oleh Albab M.U, et al., 2024 dengan judul “Implementasi Pengelolaan Surat Dinas Berbasis Digital Melalui Aplikasi E-Buddy Sidoarjo di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon”. Penelitian yang dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan surat dinas berbasis digital melalui aplikasi E-Buddy Sidoarjo di Pemerintah Desa Kedungrejo masih menghadapi berbagai kendala diantaranya: kurangnya efektivitas komunikasi, keterbatasan sumber daya manusia yang mampu mengakses dan menggunakan aplikasi secara konsisten, pemanfaatan fitur yang belum maksimal, serta penyesuaian struktur birokrasi yang masih memerlukan penguatan meskipun telah mengacu pada regulasi yang ada.

Yang kedua, penelitian oleh Hanifah A. et al., 2024 dengan judul “Implementasi Penataan Naskah Dinas Elektronik Melalui E-Buddy di Desa Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo”. Dengan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan model analisis data menurut Miles & Hubberman. Hasil penelitian menunjukkan masih menghadapi kendala dalam konsistensi komunikasi, kendala penggunaan aplikasi E-Buddy oleh aparatur desa, Diperlukan strategi seperti peningkatan pelatihan, evaluasi berkala, dan pemberian insentif untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan. Dan pada birokrasi telah sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2020.

Yang ketiga, penelitian oleh Suryansyah V.A, dkk, 2022 dengan judul “Inovasi Pelayan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam Penggunaan E-Buddy”. Menggunakan metode deskriptis kualitatif, menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi pelayanan melalui penggunaan E-Buddy telah diterapkan dengan sangat baik. Dalam aspek keunggulan relatif, kesesuaian, kompleksitas, kemungkinan untuk diuji coba, serta kemudahan dalam pengamatan, E-Buddy telah memenuhi kebutuhan setiap Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sidoarjo. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa inovasi pelayanan yang diterapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo melalui E-Buddy sudah berjalan dengan optimal dan efisien. Sebagai saran, disarankan adanya pembaruan pada aplikasi E-Buddy guna meningkatkan fungsionalitasnya agar lebih baik dan semakin mudah dioperasikan.

Yang keempat, penelitian oleh Trias H.O., Mursyidah L 2025 dengan judul “Implementasi Penggunaan Aplikasi E-Buddy dalam Pengelolaan Administrasi di Pemerintah Desa Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo”. Dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa implementasi E-Buddy di Pemerintah Desa Rangkah Kidul belum sepenuhnya memenuhi kriteria komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Ditinjau dari empat indikator: 1) Komunikasi sudah dilaksanakan dengan cukup baik, namun terdapat kekurangan dalam penyampaian informasi terkait penggunaan Aplikasi E-Buddy. 2) Dari segi sumber daya, beberapa perangkat desa masih belum mampu mengoperasikan Aplikasi E-Buddy secara optimal. 3) Indikator disposisi menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Rangkah Kidul dalam hal birokrasi mengacu pada Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 4) Struktur birokrasi sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik.

Melihat berbagai dinamika tersebut, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menganalisis sejauh mana implementasi E-Buddy telah berjalan di Desa Permisian, kendala apa saja yang dihadapi, serta bagaimana proses penerapan yang dilakukan oleh aparat desa. Dengan memahami permasalahan dan tantangan yang ada, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat, dan juga memberikan wawasan yang lebih dalam guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi desa berbasis digital baik untuk saat ini hingga masa mendatang. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi desa-desa lain yang ingin menerapkan sistem serupa dalam administrasi mereka. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian mengenai implementasi kebijakan berbasis digital di tingkat pemerintahan desa serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat tema serupa.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi E-Buddy dalam administrasi pemerintah desa Permisian. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi secara langsung yang dilakukan di kantor pemerintah desa permisian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berperan dalam implementasi E-Buddy, sementara data sekunder berasal dari jurnal, buku, dan penelitian terdahulu yang relevan. Informan ditentukan secara purposive, berdasarkan keterlibatan langsung dalam implementasi E-Buddy di Pemerintah Desa Permisian, terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, serta Kaur Tata Usaha yang berperan sebagai admin operator E-Buddy. Teknik Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap, yakni reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Reduksi data merupakan penyederhanaan data yang diperoleh, untuk kemudian dikelompokkan, dan dipisahkan data yang tidak diperlukan. Tahap penyajian data dilakukan dengan menguraikan hasil temuan lapangan secara sistematis sesuai teori yang digunakan, dan penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif berdasarkan hasil analisis temuan dan teori yang digunakan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi dan menyederhanakan data hasil wawancara dan observasi untuk fokus pada empat faktor utama sesuai teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III, 1980. Empat faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini digunakan sebagai panduan dalam memahami sejauh mana aplikasi E-Buddy telah diterapkan dan faktor-faktor apa saja yang mendukung atau menghambat keberhasilannya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang sudah terkumpul dari proses wawancara dan observasi kemudian diolah dan dianalisis berdasarkan teori George C. Edward III guna menggambarkan bagaimana Implementasi E-Buddy di Pemerintah Desa Permisian, Jabon. Teori Edward III sendiri mengemukakan adanya 4 faktor yang mengindikasikan bagaimana suatu kebijakan diimplementasikan. 4 diantaranya yakni : Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

### 1. KOMUNIKASI

Komunikasi memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik. Dalam konteks organisasi, komunikasi dilakukan dengan menyampaikan maksud serta tujuan dari kebijakan publik secara jelas dan mendetail, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara optimal [11]. Dalam teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, Terdapat tiga aspek penting dalam komunikasi, yaitu transmisi, yang menekankan pada pentingnya penyampaian informasi kebijakan secara tepat kepada pelaksana; kejelasan, yang mengharuskan setiap kebijakan disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan tidak menimbulkan ambiguitas; serta konsistensi, yang memastikan bahwa informasi yang disampaikan tidak berubah-ubah atau saling bertentangan antar level pelaksana.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Khofifatul Ummah *et al* (2023) mengenai “implementasi aplikasi E-Buddy di Pemerintah Desa Kajeksan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo” menunjukkan bahwa penerapan E-Government melalui aplikasi tersebut belum berjalan optimal. Penelitian ini menemukan adanya permasalahan pada aspek komunikasi, seperti sosialisasi dan bimbingan teknis yang belum maksimal, kurangnya kejelasan informasi bagi perangkat desa, serta ketidakkonsistenan penggunaan aplikasi dalam penyampaian surat dinas yang masih sering dilakukan melalui WhatsApp. Dalam hal ini, pemerintah desa permisian juga mengalami hal yang sama, dibuktikan dengan hasil analisis berikut :

a. Transmisi

Tujuan dari aspek transmisi pada indikator komunikasi dalam implementasi kebijakan menurut Edward adalah agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana program saja, tetapi juga menjangkau kepada pihak-pihak lain yang terlibat serta kelompok yang menjadi sasaran program tersebut [12].

Sosialisasi berasal dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yang secara struktural membawahi pengelolaan E-Buddy (melalui Diskominfo dan BKD). Artinya, komunikasi kebijakan dilakukan oleh aktor pembuat sekaligus penanggung jawab program di tingkat kabupaten. Sosialisasi tersebut ditujukan kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Sidoarjo, termasuk: Perangkat Daerah (OPD), Camat dan Prangkat Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan.

*“Sosialisasi E-Buddy dulu karna di masa pandemi, jadi dilakukan secara daring lewat Zoom. Disitu kita diperkenalkan aplikasi E-Buddy, cara penggunaannya bagaimana, langkah-langkahnya, fitur-fiturnya, Terus pernah juga sosialisasi secara langsung dapat undangan dari Kecamatan Jabon, Saya yang hadir.”* (Yesti Dwi Afriana (Kaur Tata Usaha dan Umum Pemerintah Desa Permisan), Wawancara Pribadi, 14 April 2025)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, informan menyampaikan bahwa sosialisasi terkait penggunaan aplikasi E-Buddy telah dilaksanakan melalui dua metode, yaitu secara online melalui Zoom Meeting dan secara offline melalui undangan langsung dari pihak Kecamatan Jabon. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah setempat telah berupaya menyampaikan informasi secara maksimal dengan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi yang tersedia.



**Gambar 10.** Zoom meeting Bimtek E-Buddy  
Sumber : Youtube Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

Sosialisasi daring memungkinkan pelaksana dari berbagai lokasi tetap dapat mengikuti penjelasan mengenai penggunaan E-Buddy tanpa harus hadir secara fisik, yang sangat membantu dalam efisiensi waktu dan sumber daya. Sementara itu, sosialisasi luring melalui undangan langsung memberikan kesempatan untuk diskusi lebih intens dan praktik langsung penggunaan aplikasi, sehingga peserta lebih memahami teknis implementasinya.

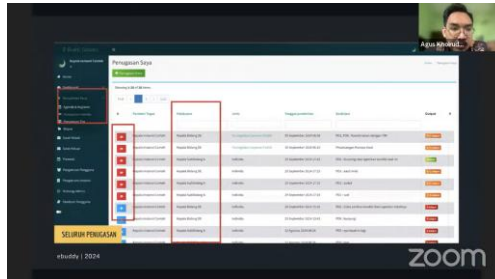
Dengan dua pendekatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses penyampaian informasi terkait E-Buddy sudah berjalan dengan baik dan menyentuh seluruh elemen pelaksana di lapangan. Ini menunjukkan bahwa komunikasi vertikal dari tingkat kecamatan ke desa telah terjalin dengan efektif, yang merupakan salah satu indikator penting dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Adanya sosialisasi yang menyeluruh juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa seluruh perangkat desa memiliki pemahaman yang sama terhadap sistem yang akan diterapkan, demi kelancaran proses administrasi pemerintahan yang lebih modern dan efisien.

b. Kejelasan

Berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward III, keberhasilan komunikasi sangat dipengaruhi oleh kejelasan pesan yang disampaikan. Dengan adanya kejelasan tersebut, para pelaksana dan pihak terkait dapat memahami maksud, tujuan, sasaran, serta isi dari kebijakan publik secara tepat. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengetahui apa yang harus dipersiapkan dan dilaksanakan dalam proses implementasi kebijakan tersebut [13].

*“Informasi yang disampaikan waktu Zoom saya rasa sudah jelas dan bisa saya pahami, tapi mungkin kurang membicarakan detail teknisnya secara terperinci. Karna mungkin terbatas durasi juga, dan memang saking banyak nya pertanyaan jadi tidak semua terjawab. Selebihnya kita belajar secara otodidak. Kadang juga saling komunikasi sesama operator kalo misal ada langkah-langkah yang kurang paham”* (Yesti Dwi Afriana (Kaur Tata Usaha dan Umum Pemerintah Desa Permisan), Wawancara Pribadi, 14 April 2025)

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa penyampaian informasi terkait penggunaan aplikasi E-Buddy telah dilakukan dengan sangat jelas. Informasi yang diberikan mencakup panduan langkah-langkah penggunaan serta penjelasan fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi tersebut. Pernyataan ini didukung dengan adanya zoom meeting pemaparan materi mengenai cara pengoperasian E-Buddy atau tutorial step by step yang diajarkan.



**Gambar 11.** Zoom meeting sosialisasi E-Buddy  
Sumber : Screenshot zoom meeting pemkab sidoarjo

Gambar tersebut menunjukkan adanya pemaparan mengenai cara mengoperasikan aplikasi E-Buddy secara runtut. Hal ini menunjukkan bahwa proses komunikasi kepada pelaksana, khususnya operator yang bertugas mengelola aplikasi, berjalan secara efektif tanpa menimbulkan kebingungan karena informasi yang disampaikan sudah jelas. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penyebaran informasi telah tepat sasaran dan turut mendukung kelancaran proses implementasi kebijakan secara optimal.

#### c. Konsistensi

Konsistensi merupakan faktor penting dalam keberhasilan komunikasi. Menjaga konsistensi ini bergantung pada komitmen dari pembuat kebijakan hingga pelaksana, baik dari tingkat pimpinan maupun staf. Dengan konsistensi yang terjaga, kebijakan yang diterapkan dapat terhindar dari ketidaksesuaian dan kebingungan [13].

*“Sebenarnya, semua informasi kedinasan terutama edaran surat menyurat itu kita semua bisa akses melalui E-Buddy. Tapi kan komunikasi utama kita antar pegawai tentunya pakai Grup Whatsapp. Jadinya semua edaran juga disampaikan di grup Whatsapp”* (Yesti Dwi Afriana (Kaur Tata Usaha dan Umum Pemerintah Desa Permisian), Wawancara Pribadi, 14 April 2025)

*“kebanyakan info ya saya sampaikan di grup. Lebih cepat. Misal ada rapat, briefing begitu juga langsung saja saya share di grup”* (Mudjito (Kepala Desa), Wawancara Pribadi, 14 April 2025)

Dari hasil wawancara, terungkap bahwa meskipun perangkat desa sudah dapat mengakses aplikasi E-Buddy secara mandiri, dalam pelaksanaannya penyampaian informasi seperti surat undangan atau pemberitahuan dan surat kedinasan lainnya masih kerap dilakukan melalui aplikasi pesan seperti WhatsApp. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun E-Buddy telah difungsikan sebagai media komunikasi resmi, penggunaan jalur komunikasi alternatif secara informal tetap dilakukan sebagai pendukung. Berikut data yang menunjukkan penyampaian informasi melalui whatsapp.



**Gambar 12.** Penyampaian informasi melalui grup whatsapp  
Sumber : Pemerintah Desa Permisian, 2025

Penggunaan dua media komunikasi secara bersamaan, yakni E-Buddy dan WhatsApp, menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam proses penyampaian informasi. Meski tujuannya untuk memastikan pesan sampai kepada penerima, hal ini dapat menciptakan potensi duplikasi atau ketergantungan pada media tidak resmi. WhatsApp biasanya digunakan untuk mempercepat distribusi informasi, terutama jika notifikasi dari E-Buddy belum diterima atau belum diakses oleh perangkat desa.

Namun, dalam konteks implementasi kebijakan yang ideal, penggunaan saluran komunikasi seharusnya dilakukan secara konsisten agar tidak terjadi tumpang tindih informasi dan tetap menjaga keselarasan jalur komunikasi. Konsistensi ini penting untuk menjamin profesionalisme, akuntabilitas, serta terciptanya sistem administrasi pemerintahan desa yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang mengacu pada teori implementasi kebijakan George C. Edward III, khususnya dalam aspek komunikasi, dapat disimpulkan bahwa implementasi aplikasi E-Buddy di Desa Permisian telah menunjukkan upaya yang cukup baik dalam hal penyampaian informasi kepada para pelaksana. Ketiga aspek komunikasi yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi telah dijalankan, meskipun masih terdapat beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian.

Pada aspek transmisi, penyampaian informasi mengenai aplikasi E-Buddy telah dilakukan melalui dua metode, yaitu daring dan luring. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam menjangkau seluruh pelaksana program secara maksimal dan merata, sehingga informasi dapat diterima dengan baik oleh seluruh perangkat desa. Melalui kombinasi kedua metode tersebut, proses sosialisasi menjadi lebih inklusif karena mampu menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing pelaksana.

Pada aspek kejelasan, informasi yang disampaikan dinilai sudah cukup jelas dan mudah dipahami oleh pelaksana. Mereka mendapatkan pemahaman tentang cara penggunaan serta fungsi dari fitur-fitur yang ada dalam aplikasi E-Buddy, yang menunjang pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien. Kejelasan informasi ini turut meminimalkan terjadinya kesalahan dalam pengoperasian aplikasi selama proses pelayanan administrasi berlangsung.

Namun, pada aspek konsistensi, masih ditemukan penggunaan dua saluran komunikasi yang berjalan bersamaan, yaitu E-Buddy dan WhatsApp. Meskipun WhatsApp digunakan untuk mempercepat penyampaian informasi, kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi belum sepenuhnya konsisten. Hal ini berisiko menimbulkan tumpang tindih informasi atau bahkan ketergantungan terhadap media informal. Apabila tidak dikelola dengan baik, dualisme saluran komunikasi ini dapat mengurangi efektivitas sistem utama yang telah dirancang secara resmi.

Dengan demikian, meskipun komunikasi dalam implementasi aplikasi E-Buddy secara umum telah berjalan dengan baik, tetap diperlukan peningkatan pada aspek konsistensi agar proses implementasi kebijakan dapat berlangsung secara lebih terstruktur, akuntabel, dan profesional di masa mendatang. Penguatan standar operasional komunikasi menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh informasi tersampaikan melalui mekanisme yang telah ditetapkan secara resmi.

## 2. SUMBER DAYA

Faktor sumber daya juga mempunyai pengaruh yang sangat penting. Ketersediaan sumber daya dalam melaksanakan sebuah program merupakan salah satu faktor yang harus selalu diperhatikan. Pelaksanaan suatu kebijakan akan berjalan optimal apabila didukung oleh sumber daya yang memadai, baik dari segi kualitas sumber daya manusia, ketersediaan informasi, maupun sarana pendukung seperti perangkat teknologi, perlengkapan kerja, dan pendanaan yang cukup untuk menunjang program serta kegiatan yang direncanakan. Kemudian sumberdaya organisasi itu sendiri, seperti kemampuan atau keahlian orang-orang yang menjalankan kebijakan tersebut. Sehingga, keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada seberapa baik orang-orang yang bertugas bisa memahami dan menjalankan tugasnya [14].

Staf atau sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor utama dalam implementasi kebijakan, karena kegagalan sering terjadi akibat jumlah staf yang tidak mencukupi, tidak memadai, atau tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah implementor saja tidak cukup, tetapi harus disertai dengan keahlian, kompetensi, dan kapabilitas yang sesuai dengan tuntutan kebijakan.

Selain itu, fasilitas pendukung juga menjadi faktor penting, seperti fasilitas sarana prasarana. Karena meskipun staf telah mencukupi, memahami tugas, dan memiliki wewenang, tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai, implementasi kebijakan tetap tidak akan berjalan secara optimal atau berhasil.

Penelitian terdahulu oleh Dewi, K.C *et al* (2022) berjudul “Implementasi E-Government Penggunaan Aplikasi E-Buddy Dalam Pengelolaan Surat Masuk Di Desa Keper Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo” menunjukkan hasil bahwa implementasi aplikasi E-Buddy di Desa Keper dalam penerapannya sudah berhasil dilakukan. Terutama jika dilihat dari faktor sumberdaya. Sumberdaya manusia yang ada sudah cukup kuat karena telah dibekali dengan pelatihan awal dan lanjutan. Meskipun terkadang terdapat hambatan jaringan internet, hal ini tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kesiapan para operator aplikasi E-Buddy di Desa Keper. Hal ini membuktikan bahwa kesiapan perangkat desa sudah sangat siap karena telah dibekali dengan pelatihan.

a. Sumber Daya Manusia

Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia. Dalam teori kebijakan Edward III, salah satu hal yang menjadi paling penting yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan tentunya didukung dengan sumber daya manusia yang baik, capable, baik secara kualitas maupun kuantitasnya.

*“Sebenarnya E-Buddy ini semua pegawai bisa akses. Tapi operatornya E-Buddy mba yesti. Monggo ke mba yesti, karna mba yesti juga pernah ikut pelatihatannya”* (Muhammad Nailul Authon (Sekertaris Desa Permisan), Wawancara Pribadi, 14 April 2025)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia pada Pemerintah Desa Permisan, Jabon secara kuantitas sudah sangat tercukupi. Terbukti dari terdapatnya seluruh pegawai Pemerintah Desa Permisan. Di desa permisan sendiri, yang bertugas sebagai operator utama adalah Ibu Yesti sebagai Kaur TU. Sehingga kegiatan surat menyurat di E-Buddy di desa permisan hampir sepenuhnya dioperasikan oleh Ibu Yesti. Namun demikian, semua pegawai tetap dapat mengakses aplikasi E-Buddy sesuai dengan akun yang telah didaftarkan, hal ini didukung oleh data berikut :

*Tabel 2. Pengguna E-Buddy*

No.	Nama	Jabatan
1	Mudjito	Kepala Desa
2	Muhammad Nailul Authon	Sekertaris Desa
3	Yesti Dwi Afriana	Kaur Tata Usaha dan Umum
4	Chamilatus Saadah	Kaur Keuangan
5	Verikah Dwi Windari	Kaur Perencanaan
6	Muhammad Fatihul Iman	K.A. Seksi Pemerintahan
7	Maulidia Khasanah	K.A. Seksi Kesejahteraan
8	Mashudi	K.A. Seksi Pelayanan
9	Yahya	Kasun

*Sumber : Pemerintah Desa Permisan (2025)*

Tabel 2 menampilkan daftar pegawai Pemerintah Desa Permisan yang telah terdaftar sebagai pengguna aplikasi E-Buddy. Keberagaman jabatan yang tercantum menunjukkan bahwa seluruh unsur struktural pemerintahan desa telah terlibat dalam pemanfaatan aplikasi E-Buddy. Hal ini menjadi indikator bahwa dari sisi sumber daya manusia, baik secara jumlah maupun fungsi, Pemerintah Desa Permisan telah memiliki kapasitas yang memadai untuk mendukung implementasi aplikasi digital dalam proses ketatausahaan desa.

*“kalo menjalankan aplikasinya sih mudah dan tidak ada kesulitan. Tapi dulu waktu sosialisasi ada beberapa langkah-langkah yang saya kurang paham. Jadi ya saya pelajari sendiri, atau tanya-tanya ke teman operator dari desa lain. Jadi bisa dibilang kita juga jalan sambil belajar.”* (Yesti Dwi Afriana (Kaur Tata Usaha dan Umum Pemerintah Desa Permisan), Wawancara Pribadi, 14 April 2025)

*“aplikasinya itu gampang mba, cuman kadang nggeh saya minta diajari mba yesti kalo ada yang tidak ngerti”* (Muhammad Nailul Authon (Sekertaris Desa Permisan), Wawancara Pribadi, 14 April 2025)

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dinilai bahwa kompetensi atau kemampuan pegawai dalam mengoperasikan aplikasi E-Buddy juga dinilai sudah dapat menguasai fitur-fitur dan mengaplikasikannya dengan baik. Hal ini dikarenakan operator telah dibekali dengan sosialisasi yang matang, sehingga dapat mengaplikasikan E-Buddy dengan lancar tanpa hambatan. Meskipun terdapat beberapa informasi yang belum disampaikan pada saat sosialisasi, operator telah mempelajari keseluruhan fitur E-Buddy secara otodidak atau mandiri, maupun dengan bertanya ke sesama operator apabila mengalami sebuah kendala.

b. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Pada teori Edward III, diungkapkan juga bahwa Sumber daya pendukung, yakni sarana dan prasarana yang memadai akan memperlancar proses pelaksanaan kebijakan, meminimalkan hambatan teknis, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja para pelaksana. Sebaliknya, apabila sarana dan prasarana tidak tersedia atau tidak sesuai kebutuhan, maka implementasi kebijakan berpotensi berjalan kurang optimal.

*“Kalo spek komputer nya kita sudah sangat baik jadi tidak ada masalah. Ini juga komputer yang saya gunakan sangat mendukung untuk menjalankan aplikasi E-Buddy. Begitupun komputer teman-teman. Karna kan memang waktu usulan pengadaan barang kita mengajukan spesifikasi yang kita butuhkan”* (Yesti Dwi Afriana (Kaur Tata Usaha dan Umum Pemerintah Desa Permisan), Wawancara Pribadi, 14 April 2025)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, sumber daya pendukung, terutama sarana dan prasarana dirasa sudah sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan spesifikasi computer yang dapat menunjang kebutuhan pegawai sehingga tidak mengalami hambatan dalam hal teknologi. Tidak hanya spesifikasi computer, tentunya jaringan internet yang dibutuhkan juga sudah mendukung. Hal ini dibuktikan dengan data spesifikasi computer yang digunakan oleh operator sebagai berikut :

*Tabel 3. Fasilitas penunjang E-Buddy*

No	Jenis Perangkat	Jumlah
1	Monitor LG 24MK400H 24inch	1
2	CPU	1
3	Printer Epson L5190	1

*Sumber : Pemerintah Desa Permisan (2025)*

Berdasarkan data tersebut, fasilitas yang disediakan oleh pemerintah desa Permisan untuk menunjang implementasi E-Buddy sudah terbilang cukup memadai. Ketersediaan perangkat komputer, jaringan internet yang stabil, serta dukungan *software* yang sesuai menjadi faktor pendukung kelancaran operasional aplikasi. Selain itu, adanya pemeliharaan dan pembaruan sistem secara berkala turut memastikan bahwa aplikasi dapat digunakan secara optimal tanpa kendala teknis yang berarti. Dengan fasilitas yang memadai tersebut, proses pelayanan administrasi desa menjadi lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Maka berdasarkan hasil analisis menggunakan teori implementasi kebijakan Edward pada factor sumberdaya di pemerintah desa permisan, penulis menyimpulkan bahwa dari aspek sumber daya manusia, upaya implementasi kebijakan dinilai sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari seluruh pegawai desa telah terdaftar sebagai pengguna aktif aplikasi, sehingga secara kuantitas dinilai sudah mencukupi. Meskipun dalam praktiknya pengoperasian utama lebih terpusat pada Kaur TU sebagai operator. Hal ini menunjukkan adanya kesiapan struktural dalam mendukung digitalisasi pelayanan administrasi desa.

Sementara itu, dari aspek sarana dan prasarana dinilai sudah sangat baik dalam mendukung implementasi, ketersediaan perangkat komputer dengan spesifikasi yang sesuai, jaringan internet yang stabil, serta dukungan sistem yang memadai mampu menunjang operasional aplikasi tanpa hambatan teknis yang signifikan. Dengan demikian, kedua indikator tersebut memperlihatkan bahwa Pemerintah Desa Permisan telah memiliki fondasi sumber daya yang cukup kuat untuk mendukung implementasi aplikasi E-Buddy dalam proses ketatausahaan desa.

### 3. DISPOSISI

Menurut Edward, agar sebuah kebijakan dapat dijalankan dengan efektif, para pelaksana tidak hanya perlu memahami apa yang harus dilakukan, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk menjalankannya dengan baik. Hal ini penting agar pelaksanaan kebijakan tidak menyimpang dari tujuan awal. Salah satu hal yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah sikap dari pelaksana itu sendiri. Jika mereka mendukung dan sejalan dengan isi kebijakan, maka pelaksanaan akan dilakukan dengan antusias. Namun, jika pandangan mereka bertentangan dengan pembuat kebijakan, maka proses pelaksanaan kemungkinan menghadapi hambatan (Syahrudin, 2018:62).

Penelitian terdahulu oleh Trias H.O., Mursyidah L 2025 dengan judul “Implementasi Penggunaan Aplikasi E-Buddy dalam Pengelolaan Administrasi di Pemerintah Desa Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo”. Dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pada indikator disposisi implementasi Aplikasi E-Buddy di Desa Rangkah Kidul belum dapat dikatakan optimal. Meskipun sistem telah digunakan secara formal, kurangnya kemampuan dan keterlibatan langsung dari Kepala Desa dan Sekretaris Desa dalam mengoperasikan aplikasi menyebabkan tanggung jawab lebih banyak dialihkan kepada Kasi Pelayanan Tata Usaha dan Umum sebagai admin. Akibatnya, proses disposisi cenderung bersifat administratif atau formalitas, sehingga berdasarkan teori George C. Edward III, indikator disposisi belum sepenuhnya terpenuhi karena komitmen dan kesiapan pelaksana belum mendukung implementasi kebijakan secara efektif.

*“Surat kita itu ada beberapa yang masih saya tanda tangani manual. Ini kalo saya posisi dikantor. Kalo pas saya dinas luar, nggeh operator nya yang menangani di aplikasi pakai tanda tangan elektronik. Itupun atas arahan saya. Soalnya saya nggeh sering ada kegiatan diluar kantor, jadi mboten selalu mbuka aplikasi. Selebihnya nggeh saya percayakan dan serahkan teng mba yesti”* (Mudjito (Kepala Desa), Wawancara Pribadi, 14 April 2025)

Maka berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa aspek disposisi masih belum bisa dikatakan berhasil. Hal ini dikarenakan desa tidak selalu aktif mengoperasikan aplikasi tersebut. Alasan utamanya adalah karena kepala desa tidak selalu berada di kantor desa karena adanya dinas luar atau kepentingan dinas lainnya. Sehingga kepala desa tidak selalu menggunakan aplikasi E-Buddy dan sebagian besar diserahkan kepada operator E-Buddy. Ini menunjukkan bahwa sikap Kepala Desa Permisan, belum sepenuhnya mendukung implementasi E-Buddy.

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa aspek disposisi dalam implementasi E-Buddy di Desa Permisan belum sepenuhnya berhasil, karena keterlibatan dan komitmen Kepala Desa dalam penggunaan aplikasi masih belum konsisten dan sebagian besar pengoperasian diserahkan kepada operator. Jika dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III, disposisi atau sikap pelaksana sangat menentukan keberhasilan kebijakan, sehingga kurangnya partisipasi aktif pimpinan menunjukkan bahwa indikator disposisi belum terpenuhi secara optimal dan dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut.

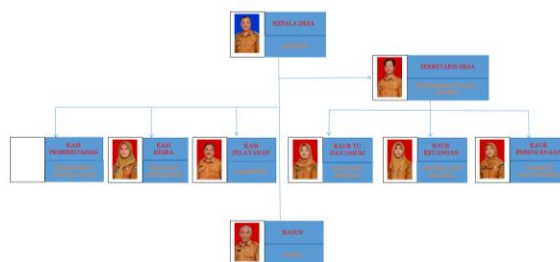
#### 4. STRUKTUR BIROKRASI

Menurut Edward III, struktur birokrasi merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Struktur birokrasi ini mencakup karakteristik seperti fragmentasi dan prosedur operasi standar (SOP) yang dapat meningkatkan kinerja organisasi.

Penelitian Terdahulu oleh Maisaroh *et al* (2025) berjudul “Implementasi Program Aplikasi Naskah Dinas Elektronik (E-Buddy) di Pemerintah Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo”. Hasil penelitian menunjukkan pada indikator struktur birokrasi, Pemerintah Desa Prasung dalam Pelaksanaannya tetap mengacu pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas. Dari sisi fragmentasi, pembagian tanggung jawab antarperangkat desa menunjukkan adanya distribusi peran yang memerlukan koordinasi agar implementasi berjalan efektif. Dengan demikian, berdasarkan teori George C. Edward III, indikator struktur birokrasi dapat dinilai cukup terpenuhi, meskipun masih terdapat ruang perbaikan terutama dalam penyusunan SOP yang lebih spesifik di tingkat desa.

##### a. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi yang baik harus memiliki fragmentasi yang jelas, yaitu pembagian tanggung jawab antar unit yang spesifik agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan fokus dan efisien. Struktur yang terorganisir dengan baik akan memudahkan koordinasi dan meningkatkan kinerja organisasi dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini didukung dengan data sebagai berikut.



**Gambar 13.** Struktur Organisasi Pemerintah Desa Permisan  
Sumber : Pemerintah Desa Permisan (2025)

Berdasarkan data tersebut, Struktur organisasi tata kerja Pemerintah Desa Permisan menunjukkan pembagian tugas yang jelas dan sistematis, yang mencerminkan prinsip-prinsip birokrasi sebagaimana dijelaskan oleh Edward III. Struktur ini terdiri dari beberapa bagian utama yang saling terhubung dan memiliki fungsi masing-masing, mulai dari kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi, kepala urusan, hingga kepala dusun.

*“Kalau untuk pembagian tugas, sebenarnya sudah jelas mengikuti struktur yang ada. Biasanya yang buat dan input surat itu bagian administrasi atau operator. Setelah itu dicek dulu sama Sekdes, baru nanti diajukan ke Kepala Desa untuk disetujui dan ditandatangani secara elektronik.”* (Yesti Dwi Afriana (Kaur Tata Usaha dan Umum Pemerintah Desa Permisan), Wawancara via Whatsapp, 22 Oktober 2025)

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pembagian tugas dalam penggunaan E-Buddy telah mengikuti struktur organisasi yang ada, dengan alur kerja yang. Kondisi ini menunjukkan bahwa indikator struktur birokrasi telah terpenuhi, khususnya pada aspek fragmentasi dan kejelasan rantai komando. Pembagian tanggung jawab yang spesifik serta alur koordinasi yang terstruktur membantu meminimalkan tumpang tindih tugas dan mendukung implementasi kebijakan berjalan lebih terarah dan efektif.

##### b. SOP

SOP adalah standar kegiatan yang harus dilakukan secara berurutan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Jika ditaati, SOP akan menghasilkan koordinasi yang lancar, menghindari tumpang tindih atau duplikasi, membangun hubungan kerja yang harmonis, serta memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab setiap pegawai.

“Kalo SOP kita ngikut dari aturan pemkab. Jadi semua alur persurata dilakukan digital di E-Buddy. Di awal memang agak menyesuaikan karena sebelumnya terbiasa manual. Tapi sekarang sudah lebih terbiasa dan mengikuti prosedur yang ada.” (Yesti Dwi Afriana (Kaur Tata Usaha dan Umum Pemerintah Desa Permisan), Wawancara Pribadi, 14 April 2025)



**Gambar 14.** PerBup Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Naskah Dinas  
Sumber : Website BPK

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penerapan aplikasi E-Buddy di Pemerintah Desa Permisan berlandaskan pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik. Peraturan ini menegaskan bahwa seluruh proses pengelolaan naskah dinas harus dilakukan secara digital melalui aplikasi surat resmi, yaitu E-Buddy. Implementasi ini juga diperkuat oleh arahan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo yang mewajibkan seluruh desa untuk menggunakan E-Buddy sebagai media utama dalam pengelolaan surat dinas.

Struktur birokrasi Pemerintah Desa Permisan telah menunjukkan pembagian tugas, fungsi, dan wewenang yang jelas antarbagian. Fragmentasi yang terorganisir dengan baik memungkinkan pelaksanaan kebijakan, termasuk implementasi E-Buddy, berjalan lebih fokus, terarah, dan efisien. Selain itu, struktur yang sistematis juga mendukung koordinasi yang lebih lancar, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta meningkatkan akuntabilitas dalam pelayanan publik di tingkat desa.

Penerapan SOP dalam implementasi E-Buddy telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik. SOP tersebut memberikan pedoman yang sistematis dan tertulis dalam pengelolaan surat dinas secara digital. Dengan adanya aturan dan arahan yang tegas dari pemerintah daerah, pelaksanaan administrasi berbasis elektronik menjadi lebih terstandar, terkontrol, serta mendukung efektivitas dan efisiensi kerja perangkat desa.

Dengan ini penulis menyimpulkan, berdasarkan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III, pada indikator struktur birokrasi dapat dinilai cukup berhasil. Hal ini karena telah terdapat pembagian tugas yang jelas, rantai komando yang terstruktur, serta SOP yang berlandaskan regulasi resmi, sehingga mendukung pelaksanaan E-Buddy secara terarah dan sistematis.

## VII. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi aplikasi E-Buddy di Desa Permisan, Kecamatan Jabon, telah berjalan cukup baik namun masih menghadapi beberapa kendala, diantaranya : Dari indikator komunikasi, pada aspek konsistensi masih terjadi adanya dualisme penyampaian informasi. Karena dilakukan 2 komunikasi melalui aplikasi yang berbeda sehingga menyebabkan adanya resiko tumpang tindih informasi. Hal ini menunjuka ketidak konsistenan penyampaian informasi. Pada aspek disposisi, ditemukan bahwa dukungan pelaksana kebijakan, khususnya Kepala Desa, belum maksimal karena Kepala Desa tidak sepenuhnya mengaplikasikan E-Buddy. Hal ini dikarenakan seringnya perjalanan dinas luar yang mengakibatkan kepala desa tidak selalu membuka aplikasi E-Buddy. Sehingga dalam indikator ini, kepala desa dirasa kurang mendukung implementasi kebijakan. Selain kendala di indikator komunikasi dan disposisi, indikator lainnya seperti indikator sumber daya dan struktur birokrasi telah terlaksana dengan baik. Secara keseluruhan, penerapan E-Buddy membawa dampak positif terhadap efektivitas dan efisiensi proses ketatausahaan di desa, namun masih dibutuhkan perbaikan pada beberapa aspek agar implementasinya dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan anugerah-Nya sehingga tugas akhir yang berjudul “Implementasi E-Buddy Pada Proses Ketatausahaan di Desa Permisian, Jabon” ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Proses penyusunan karya ilmiah ini tidak terlepas dari berbagai tantangan, namun berkat dukungan, bimbingan, dan kerja sama dari berbagai pihak, seluruh rangkaian penelitian dapat diselesaikan secara optimal. Oleh karena itu, penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Desa Permisian Kecamatan Jabon Kabupaten Pasuruan, atas kesempatan, bantuan, serta penyediaan data dan informasi yang diperlukan selama penelitian berlangsung. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para informan dan seluruh pihak yang telah berkontribusi melalui waktu, pemikiran, serta dukungan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

## REFERENSI

- [1] U. Silalahi, *Studi Tentang Ilmu Administrasi. Konsep, Teori dan Dimensi*. 1992.
- [2] L. Marliani, “Definisi Administrasi dalam Berbagai Sudut Pandang,” *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, vol. 5, no. 4, pp. 17–21, 2019, doi: <http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v5i4.1743>.
- [3] E. Junaedi, “Peran Bagian Administrasi Dalam Mengelola Surat Menyurat di Unit Perencanaan PT Jaya Real Property, Tbk.,” *Jurnal Sekretari / Administrasi Perkantoran*, vol. 9, no. 2, pp. 133–144, Jun. 2022.
- [4] M. U. Albab and I. F. Agustina, “Implementasi Pengelolaan Surat Dinas Berbasis Digital Melalui Aplikasi E-Buddy Sidoarjo di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon,” 2024, doi: <https://doi.org/10.21070/ups.6205>.
- [5] F. A. Putri, “Peran Arsiparis dalam Pengelolaan Otomasi Arsip di Era Digital,” *Jurnal Perpustakaan dan Kearsipan*, no. 2, pp. 53–57, 2022.
- [6] A. Nurmandi, D. Kurniasih, Supardal, and A. N. Kasiwi, *Teknologi Informasi Pemerintahan*. KAPSIPI, 2019.
- [7] S. S. Wardiningsih, “Perkembangan Teknologi dan Sistem Informasi,” *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, vol. 7, no. 1, pp. 69–78, Apr. 2009.
- [8] Rifdan, Haerul, H. Sakawati, and M. N. Yamin, “Analisis Penerapan E-Government Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Tallo Kota Makassar,” *Jurnal Governance and Politics (JGP)*, vol. 4, no. 1, pp. 49–61, 2024.
- [9] V. A. Suryansyah, I. Murti, and D. Rahmadanik, “Inovasi Pelayan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam Penggunaan E-Buddy,” *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, no. 5, 2022.
- [10] M. F. Dzulfia, “Efektivitas Penggunaan E-Buddy Dalam Surat-Menyurat Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo,” *Jurnal Suara Politik*, vol. 3, no. 2, pp. 28–35, Oct. 2024, doi: <https://doi.org/10.31869/jsp.v3i2.5404>.
- [11] I. G. K. C. B. A. Kusuma, “Implementasi Insentif Pajak Menurut Model G Edward III,” *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, no. 2, pp. 236–248, 2022.
- [12] M. A. Asyafin, D. Virdani, K. D. Kasih, and L. Arif, “Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Kota Surabaya,” *Journal Publicuho*, vol. 4, no. 2, pp. 501–510, May 2021, doi: [10.35817/jpu.v4i2.18061](https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.18061).
- [13] Nurlailah, “Implementasi Kebijakan Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Ogan Komering Ulu,” *Jurnal Dinamika*, vol. 1, no. 2, pp. 59–68, 2021, [Online]. Available: <https://covid19.go.id/berita/data-vaksinasi->
- [14] E. T. Manyo’E, “Analisis Implementasi Kebijakan Pelatihan Pola Satu Pintu dengan Model Edward III di Kabupaten Gorontalo,” *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan*, vol. 2, no. 3, pp. 227–240, Sep. 2022, doi: <https://doi.org/10.51878/knowledge.v2i3.1599>.

### **Conflict of Interest Statement:**

*The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.*